

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM- MP-SPP) SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DI DESA MUARA DANAU KECAMATAN PELAWAN KABUPATEN SAROLANGUN

Aswan Asqolani

Program Studi Manajemen Pemerintahan Universitas Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program PNPM- MP yaitu dalam Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan untuk mengetahui pendapatan kelompok simpan pinjam perempuan di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun sebelum dan setelah ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode observasi dengan sampel masyarakat miskin di Kecamatan Desa Muara Danau yang mendapat bantuan dari PNPM Mandiri, Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut : rata-rata pendapatan rumah tangga miskin setelah menjadi pemanfaat dari bantuan dana bergulir simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) PNPM Mandiri mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata pendapatan rumah tangga miskin sebelum menjadi pemanfaat. Jumlah masyarakat rumah tangga miskin tahun 2014 mengalami penurunan dibanding jumlah masyarakat rumah tangga miskin tahun 2013, Kesimpulan yang dapat diberikan antara lain Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MP di Desa Muara Danau sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO). dan setelah mendapat bantuan pinjaman dari Program PNPM Mandiri terdapat peningkatan pendapatan masyarakat rumah tangga miskin, maka disarankan kepada masyarakat rumah tangga miskin yang ingin mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya untuk ikut berpartisipasi menjadi pemanfaat bantuan pinjaman dari PNPM Mandiri. Pemberian pinjaman dan bergulir dari PNPM Mandiri telah memberikan keberartian terhadap peningkatan pendapatan masyarakat rumah tangga miskin. Untuk itu disarankan agar terus ditingkatkan lagi pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat rumah tangga miskin.

Kata Kunci : PNPM Mandiri, SPKP, Dana Bergulir, Pinjaman Modal.

Abstract

This study aims to determine the implementation of the PNPM- MP Program, namely in the activities of the Women's Savings and Loan Group (SPP) and to determine the income of women's savings and loan groups in Muara Danau Village, Pelawan District, Sarolangun Regency before and after the National Program for Community Empowerment Mandiri Rural. This research was conducted using the observation method with a sample of poor people in Muara Danau Village Sub-district who received assistance from PNPM Mandiri, the results obtained in this study are as follows: the average income of poor households after becoming a beneficiary of the PNPM Mandiri women's savings and loan group (SPKP) revolving fund assistance has increased compared to the average income of poor households before becoming a beneficiary. The number of poor households in 2014 has decreased compared to the number of poor households in 2013, The conclusions that can be given include the implementation of the National Program for Rural Community

Empowerment PNPM-MP in Muara Danau Village has been implemented in accordance with the technical operational instructions (PTO). and after receiving loan assistance from the PNPM Mandiri Program there is an increase in the income of poor households, it is recommended that poor households who want to develop businesses and increase their income to participate as beneficiaries of loan assistance from PNPM Mandiri. The provision of revolving loans from PNPM Mandiri has given significance to the increase in income of poor households. For this reason, it is recommended that the provision of revolving fund loans to poor households be further improved.

Keywords: *PNPM Mandiri, SPKP, Revolving Funds, Capital Loans*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan Negara berkembang.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat khususnya di Negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademis maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus digunakan untuk menggambarkan kemiskinan.

Banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan beberapa diantaranya meluncurkan beberapa program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Sebagai upaya serius dalam meningkatkan efektivitas penekanan angka kemiskinan, pemerintah telah memiliki konsep penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan basis pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat sebagai subjek penanggulangan kemiskinan bukan objek dengan kata lain Pemerintah telah memperhatikan faktor partisipasi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan dalam program pengentasan kemiskinan.

Selam ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Upaya-upaya tersebut pada dasarnya telah dijabarkan dan tertuang dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu diantaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau yang lebih dengan istilah PNPM Mandiri. Sama halnya dengan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), PNPM Mandiri juga merupakan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia merencanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil.

Pada PNPM MP ini, terdapat banyak program yang ditawarkan pemerintah, salah satunya yaitu pemberian dana bergulir bagi kaum perempuan, yaitu Simpan Pinjam

untuk kelompok Perempuan (SPP). Pada prinsipnya, PNPM-MPd SPP merupakan upaya pemerintah untuk membantu memberdayakan masyarakat khususnya bagi perempuan, yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian dana bergulir untuk pengembangan kegiatan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana apabila program ini berhasil, maka akan berdampak pada komunitas penduduk, serta kaum perempuan dapat lebih mandiri dan mampu menjadi penyokong kesejahteraan keluarga. Untuk mendukung dan merealisasikan hal di atas maka pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan untuk menekan angka kemiskinan.

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang dilaksanakan seseorang aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang ingin dituju (Agustino, 2008:7)¹.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah pusat untuk menekan angka kemiskinan beberapa diantaranya meluncurkan beberapa program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan ini bertumpu pada pendekatan proses partisipatif. Keswadayaan dari kelompok masyarakat yang menjadi target program, sehingga pemerintah hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan dan membimbing. Dalam implementasinya, program ini melibatkan seluruh unsure yang terdapat di daerah, mulai dari unsure pemerintah, pihak konsultan maupun segenap lapisan masyarakat yang menjadi sasaran program ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai regulasi revisi atas Undang-undang No. 22 tahun 1999, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Pemda) dengan lebih nyata dan ril. Mulai saat itu pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Agustino, 2008:1)

Menurut Carl Friedrich (Agustino, 2008:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Meskipun maksud atau tujuan kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku

Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaiannya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Menurut Lenster dan Stewart Jr (Agustino, 2008:139) implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*input*), keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir (*output*) yaitu pencapaian atau tindakannya tujuan yang ingin diraih³.

Teori-teori Implementasi Kebijakan

Nawawi (2007) megemukakan beberapa teori dari beberapa ahlimengenai implementasi kebijakan, yaitu:

a. Teori George C. Edward III

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan pada personalia yang tepat.
2. Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dll. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau carapandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Untuk mengantisipasinya, dapat mempertimbangkan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
4. Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, guna pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III, yang dianggap relevan dengan materi pembahasan dari obyek yang diteliti. Hal ini bukan berarti bahwa peneliti menjustifikasi teori-teori lain tidak lagi relevan dengan perkembangan teori implementasi kebijakan publik, melainkan lebih mengarahkan kepada peneliti agar lebih fokus terhadap variabel-variabel yang dikaji melalui penelitian ini, sehingga membantu dalam menjawab tujuan dari penelitian ini.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. (Suharto, 2010:59)⁴.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk

mempengaruhi untuk kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal. Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) mulai tahun 2007. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan

acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Program ini terdiri dari beberapa program penanggulangan kemiskinan salah satunya Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan atau disingkat menjadi PNPM Mandiri Perdesaan yang sebelumnya bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan) Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam Upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan.

Pancairan Dana dan Prosedur Pemberian Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Muara Danau tahapan-tahapan seperti prosedur perkreditan pada umumnya. Adapun prosedur pemberian Pinjaman dari PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Muara Danau adalah sebagai berikut:

a. Permohonan

Kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini diberikan bukan secara perorangan tetapi secara berkelompok. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan kredit harus membentuk kelompok terlebih dahulu agar bisa mendapat dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan. Pembentukan kelompok sepenuhnya diserahkan pada masyarakat yang ditunjuk sebagai kelompok sasaran.

b. Syarat-syarat

Syarat yang harus dipenuhi masyarakat supaya dapat meminjam dana PNPM Mandiri Perdesaan ini mengumpulkan KTP masih aktif, serta anggota kelompok itu mempunyai usaha yang produktif. Pembentukan kelompok tersebut diserahkan penuh kepada kelompok sasaran, karena dianggap lebih efektif. Sedangkan untuk pemilihan pengurus seperti ketua, sekretaris, bendahara harus bertanggung jawab terhadap penyetoran angsuran dari anggota. Selain itu ketua merupakan orang pertama yang akan mendapat teguran bila ada hal-hal yang menyimpang dari anggotanya. Setelah

terbentuk kelompok, maka kelompok usaha tersebut mengajukan permohonan dana kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Dalam pengajuan dana ini setiap kelompok harus membuat proposal pengajuan dana yang dilampiri foto copy KTP setiap anggota. Agar dana

bantuan dapat cair para pedagang harus membuat proposal yang disertai lampiran fotocopy KTP yang masih aktif.

Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh Kelompok, pihak PNPM Mandiri Perdesaan melakukan penyidikan dan analisa kredit melalui tim verifikasi dari kecamatan. Setelah kelompok mengajukan proposal pengajuan kredit dari kecamatan yaitu Tim Verifikasi datang kekelompok untuk memeriksa antara lain persyaratan kelompok, kondisi kegiatan anggota kelompok mulai dari permodalan, jenis usaha sampai pendapatan anggota, Studi kelayakan usaha tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian antara permohonan dana dan usaha yang dijalankan. Dengan ini diharapkan dapat mempermudah proses pemberian Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan

Tinjauan tentang Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Setiap orang yang bekerja pasti mengharapkan suatu imbalan baik yang berupa pendapatan, baik barang maupun uang. Karena dengan uang tersebut mampu memenuhi kebutuhan mereka agar dapat melangsungkan kehidupannya. Begitu juga dengan pedagang, pendapatan merupakan hal yang sangat penting bagi mereka khususnya pedagang golongan ekonomi lemah, Pendapatan dapat diperoleh dari usaha sendiri maupun dari pemberian orang lain. Jadi pengertian pendapatan adalah penerimaan baik yang berupa uang, barang dan atau jasa yang dinilai dengan uang yang diterima seseorang dari usaha sendiri maupun dari pemberian orang lain dalam kurun waktu tertentu Sofia Arini (2008:20)⁵.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Besar kecilnya pendapatan khususnya pedagang golongan ekonomi lemah ditentukan oleh besar kecilnya usaha, kuantitas serta kualitas dari transaksi penjualan yang dilakukan. Adapun faktor yang mempengaruhi besar kecilnya usaha, kuantitas serta kualitas transaksi penjualan adalah sebagai berikut :

1) Modal Usaha

Modal usaha atau Capital adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung, dalam upaya untuk menambah penghasilan output). Dalam suatu usaha masalah modal mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan berhasil tidaknya suatu usaha yang telah didirikan.

2) Pengalaman Usaha

Pengalaman usaha identik dengan lamanya waktu seseorang menjalankan usahanya. Hal ini memberikan asumsi semakin lama seseorang menekuni usahanya, maka membuat seseorang mendapat pengalaman dan teknik-teknik baru dalam berdagang.

3) Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita karena merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan manusia. Pendidikan adalah suatu proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga mereka dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.

4) Lokasi Usaha

Seorang pedagang harus mampu memilih lokasi yang strategis untuk tempat berjualan mereka. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pedagang, terutama pedagang kecil golongan ekonomi lemah adalah faktor pesaing usaha, kondisi lingkungan tempat berjualan dan jauh dekatnya dengan sumber barang dagangan.

5) Sikap Usaha

Sikap seorang pedagang merupakan sikap dalam mengembangkan usahanya, adanya

sikap usaha dagang dalam diri pedagang menunjukkan adanya jiwa wiraswasta. Peluang untuk menjadi wiraswasta bisa datang dari mana saja, asalkan seseorang mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk maju serta bekerja keras. Faktor-faktor diatas harus diperhatikan pedagang dalam melakukan usaha mereka. Karena faktor-faktor tersebut dapat menentukan keberhasilan suatu usaha dan agar pedagang mampu mempertahankan usaha mereka di tengah persaingan yang ketat.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dengan mendapatkan data dari tempat penelitian secara alamiah, serta wawancara langsung dengan respondennya yaitu Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Desa Muara Danau untuk mendapatkan fakta-fakta dan mencari keterangan keterangan secara faktual.

Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (Hasan, 2002:58). Dalam penelitian ini populasinya adalah Anggota Program Nasional Pembedayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Bagi Kelompok Perempuan (PNPM MP SPP) sebanyak 15 anggota dari 1 kelompok periode 2014⁷.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2009:81). Mengingat bahwa populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh data Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) untuk ekonomi produktif, maka penelitian ini dilakukan untuk memilih sampel yaitu anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang masih aktif dalam keanggotaan periode tahun 2014. Berdasarkan data yang diperoleh UPK Kecamatan Pelawanterdapat 15 anggota dari 1 kelompok pada periode tersebut yang masih aktif dan masih tinggal di Desa Muara Danau serta menggunakan dana sebagai kegiatan ekonomi produktif.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada kegiatan program PNPM MP SPP. Dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung kegiatan PNPM Mandiri pedesaan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung betatap muka antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab seputar pelaksanaan program PNPM MP.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau keterangan tertulis yang sudah ada.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Hasan (2002:82) sumber data yang diperoleh dalam penelitian yaitu:

1. Dataprimer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer berupa data langsung dari wawancara yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan.
2. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik Sarolangun, Kantor Camat Pelawan, Kantor Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Pelawan⁸.

Teknik Analisis Data

1. Pada tujuan yang pertama mendeskripsikan kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Muara Danau dengan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok, manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pada peristiwa masa sekarang. Deskripsi pelaksanaan kegiatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM Mandiri Pedesaan diketahui dengan bertanya langsung kepada responden atau menggunakan data-data yang ada pada instansi terkait.
2. Pada tujuan kedua yaitu menganalisis pelaksanaan kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Muara Danau metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang dianalisa adalah mekanisme pengelolaan dan ketentuan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Jumlah Pendapatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan setelah mendapat pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Muara Danau.

No	Nama	Pendapatan Sebelum Pinjaman, Bln	Pendapatan setelah Pinjaman/Bln
1	Soliha	Rp. 650.000	Rp. 1.000.000
2	Sumiati	Rp. 700.000	Rp. 1.400.000
3	Marhaya	Rp. 700.000	Rp. 1.200.000
4	Darlina	Rp. 1.500.000	Rp. 3.000.000
5	Padila	Rp. 600.000	Rp. 1.000.000
6	Maimuda	Rp. 400.000	Rp. 1.000.000
7	Ernawati	Rp. 800.000	Rp. 1.500.000
8	Eka	Rp. 300.000	Rp. 1.200.000
9	Yuli	Rp. 500.000	Rp. 1.300.000
10	Patmawati	Rp. 550.000	Rp. 1.450.000
11	Mardiyana	Rp. 600.000	Rp. 1.300.000
12	Nurhayati	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000
13	Desmita	Rp. 450.000	Rp. 1.000.000
14	Norsila	Rp. 400.000	Rp. 1.000.000
15	Asuro	Rp. 650.000	Rp. 1.400.000
	JUMLAH	Rp. 9.150.000	Rp. 20.250.000

Sumber : Diolah Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah menerima Pinjaman

dari PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan rata-rata peningkatan pendapatan Kelompok SPP tersebut naik sebesar Rp. 20.250.000,. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan setelah pinjaman dengan pendapatan terendah yang sebelum Pinjaman yaitu sebesar Rp. 9.150.000.

Hal ini berarti menunjukkan bahwa Program PNPM Mandiri Perdesaan efektif membantu pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun di tahun 2014, Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pendapatan masyarakat miskin di Desa Muara Danau sebelum mendapatkan pinjaman dana bergulir dari PNPM Mandiri dengan pendapatan masyarakat miskin di Desa Muara Danau setelah mendapatkan pinjaman dana bergulir dari PNPM Mandiri Perdesaan.

Melihat aktivitas ekonomi kelompok SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP di tengah-tengah masyarakat Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun merupakan sebuah rasionalisasi berjalannya roda perekonomian di sektor usaha menengah ke bawah. Dapat pula dikatakan bahwa SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kemakmuran bersama.

Sebenarnya sudah lama masyarakat Desa Muara Danau memiliki tingkat sirkulasi perekonomian cukup tinggi menginginkan berdirinya lembaga keuangan yang pro rakyat. Dengan demikian, SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP didesain sebagai lembaga keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan yang lebih dinamis. Masyarakat dapat mengajukan kredit yang digunakan untuk kegiatan usaha guna meningkatkan pendapatan dan mutu kehidupan keluarga, khususnya bagi kaum perempuan untuk dapat membantu menambah pendapatan keluarganya. Dengan demikian kredit ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi serta perkembangan seluruh anggota keluarga.

Disamping itu bunga yang dibebaskan relatif ringan yaitu 1,2% per bulan yang sifatnya tetap (flat) dari pokok yang dipinjam. Bunga pinjaman yang dibayar akan dipergunakan untuk biaya pelayanan dan pengelolaan yang sehat serta pemupukan modal dana pinjaman bergulir milik bersama agar dapat berkembang sebagai sumber kredit yang bermanfaat bagi warga masyarakat desa. Secara riil, SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-mampu menyimpan dan menyalurkan dana dalam jumlah yang cukup besar. Ini menunjukkan bahwa SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP cukup mempunyai peran yang dibutuhkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar Desa Muara Danau. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa peran SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan. Melalui kredit tersebut banyak roda perekonomian yang dapat dijalankan dan dikembangkan.

Disamping itu pihak pengelola SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP juga ikut serta mendampingi masyarakat yang mengajukan kredit, agar dapat menggunakan dana kreditnya untuk mengembangkan usaha, meningkatkan mutu kehidupan keluarga dan memperbaiki pengaturan keuangan rumah tangga. Dengan demikian kredit dapat dibayar kembali secara lancar sambil tetap memberikan manfaat yang setinggi-tingginya bagi kemajuan ekonomi masyarakat pedesaan.

Program Pinjaman SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP telah memberika keuntungan ganda bagi nasabah, khususnya bagi nasabah yang sebelumnya

telah memiliki tabungan. Disamping mendapatkan bunga tabungan, mereka juga mendapatkan pinjaman tanpa agunan. Dananya pun dapat cepat cair dan dapat langsung digunakan untuk kegiatan usahanya. Sebelum kehadiran SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNP-MP ini masyarakat Desa Muara Danau kebanyakan menjadi nasabah bank konvensional. Setelah adanya SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP, maka sebagian masyarakat Desa Muara Danau lebih memilih bertransaksi di SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP. Hal ini didasari oleh semangat kebersamaan dalam rangka memajukan ekonomi masyarakat pedesaan, di samping banyak keuntungan dan kemudahan.

Keuntungan bukan hanya dalam bentuk material, akan tetapi pihak UPK (Unit Pengelola Kegiatan) SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP juga mau dijadikan mitra usaha semacam konsultan yang dapat memonitoring dan memberikan solusi dan toleransi dibandingkan dengan bank konvensional. Indikasi positif yang lain dari peran SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP dalam perekonomian ialah aktiva pembukuan yang lancar yang menunjukkan adanya kemajuan. Laporan pembukuan yang menunjukkan peningkatan layanan nasabah juga menjadi indikator tersendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP mampu merubah kondisi ekonomi masyarakat Desa Muara Danau yang semula masih banyak yang berada pada kondisi kekurangan sekarang sudah mengalami peningkatan. Maka SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP bisa difungsikan sebagai lembaga intermediary dalam menggerakkan sektor riil di Desa Muara Danau.

Sebab sistem SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP lebih berorientasi pada sektor riil, serta bisa diarahkan untuk local oriented, di samping produknya yang lebih fleksibel, sehingga mudah diterima masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dengan demikian, keberadaan SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP dapat memberdayakan perekonomian umat. Sebab, memberdayakan ekonomi umat berarti meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada sebelumnya. Inilah yang dapat dilihat dari para nasabah SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP Desa Muara Danau. Setelah mendapatkan kucuran dana pembiayaan, mereka dapat mengembangkan usahanya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sebelum adanya pinjaman dari PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Muara Danau usaha nya tidak berkembang, karna minim nya modal dari kelompok Simpan Pinjam perempuan tersebut.
2. Dengan adanya Pinjaman dari PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan mendapatkan penambahan modal, dengan adanya Pinjaman modal dari PNPM Mandiri perdesaan tersebut Kelompok Simpan Pinjam Perempuan menggunakan uang pinjam nya untuk penambahan modal usaha yaitu untuk penambahan pembelian bahan atau alat usaha sehingga pendapatan Kelompok simpan Pinjam Perempuan tersebut rata-rata pendapatan nya meningkat dari sebelum pendapatan nya sebelum adanya Pinjaman dari PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Dengan adanya Peningkatan Penghasilan dari Kelompok Simpan Pinjam Perempuan tersebut bearti bahwa keberadaan dari Program PNPM Mandiri Perdesaan memang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di Desa Muara Danau, serta Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan berjalan

secara baik dan Efektif.

4. pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Muara Danau sudah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun 2010.
5. Pelaksanaan kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan pada Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Muara Danau sudah Berdasarkan ketentuan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam mengelola dana PNPM Mandiri ini terbukti dengan tingkat pengembalian pinjaman kepada pihak PNPM Mandiri Pedesaan tidak mengalami tunggakan dan keterlambatan dalam pembayaran kepada pihak PNPM Mandiri Pedesaan

Saran

Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pendapatan masyarakat rumah tangga miskin setelah mendapatkan bantuan pinjaman dari Program PNPM Mandiri Pedesaan, maka disarankan kepada masyarakat rumah tangga miskin yang ingin merintis usaha kecil, mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya untuk ikut berpartisipasi menjadi pemanfaat bantuan pinjaman dari PNPM Mandiri.

Pemberian pinjaman dana bergulir dari PNPM Mandiri telah memberikan keberartian terhadap peningkatan pendapatan masyarakat rumah tangga miskin. untuk itu disarankan agar terus ditingkatkan lagi pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat rumah tangga miskin, namun dengan tetap mempertimbangkan kapasitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Anjeng Anggi Yulianti, 2010, Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) di Kecamatan Candasari Kabupaten Pandeglag Periode Tahun 2009, http://repository.fisipuntirta.ac.id/74/1/SkripsiAnjeng_Yulianti.pdf (diakses 26 maret 2015)
- Hasan M.I, 2002, [http://dedikurniawanstmikpringsewu.blogspot.com/Metodologi Penelitian dan Implementasinya.html](http://dedikurniawanstmikpringsewu.blogspot.com/Metodologi_Penelitian_dan_Implementasinya.html)(diakses 26 maret 2015)
- Nawawi, I. 2007, *Public Policy, Analisis, Strategis, Advokasi Teoridan Praktek*. Surabaya: PMN
- Suharto Edi, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Sosial*. Bandung: PT RefikaAditama
- Soelaeman, 2008, *Ilmu Dasar Sosial*, PT RefikaAditama
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta AriniShofia, 2008, [http://Pengertian Pendapatan.blogspot.com](http://Pengertian_Pendapatan.blogspot.com)(diakses 26 maret 2015)
- Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP Tahun 2008. Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. UPK Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun